

**ANALISIS PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA**

(Tesis)

Oleh:

**Novi Astuti
NPM 2121031030**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**ANALISIS PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA**

Oleh:

Novi Astuti

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK**ANALISIS PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH
DI INDONESIA****Oleh****NOVI ASTUTI**

Lebih dari dua dekade sistem otonomi daerah telah di selenggarakan di Indonesia tepatnya sejak tahun 2001. Fokus implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berpusat pada kabupaten/kota dan desa dengan pertimbangan bahwa akar rumput dari pembangunan dimulai dari wilayah pemerintahan yang paling kecil, agar hasil pembangunan secara nyata dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh implementasi sistem otonomi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Populasi pada penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan total 508 sampel yang terdiri dari 415 kabupaten dan 93 kota dengan masa pengamatan periode 2015-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui belanja modal, sistem otonomi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan melalui pertumbuhan ekonomi, sistem otonomi daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja modal, kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT**ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF REGIONAL AUTONOMY ON
COMMUNITY WELFARE THROUGH ECONOMIC GROWTH AND
CAPITAL EXPENDITURE IN REGIONAL GOVERNMENTS
IN INDONESIA****By****NOVI ASTUTI**

More than two decades of the regional autonomy system have been held in Indonesia since 2001 to be exact. The focus of the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization is centered on districts/cities and villages with the consideration that the grassroots of development starts from the smallest government area so that development results are overall. can be enjoyed by all levels of society. This research was conducted with the aim of evaluating the implementation of the autonomous system in district and city local governments in Indonesia, in an effort to improve people's welfare, with capital expenditure and economic growth as intervening variables. The population in this study used all regencies and cities in Indonesia with a total of 508 samples consisting of 415 regencies and 93 cities with an observation period of 2015-2021. The results of the study show that through capital expenditure, the regional autonomy system has a significant positive effect on people's welfare. Mean while, through economic growth, the regional autonomy system has a significant negative effect on people's welfare.

Keywords: Regional Autonomy, Economic Growth, Capital Expenditure, Community Welfare.

Judul Tesis : **ANALISIS PENGARUH OTONOMI DAERAH
TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MELALUI PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Novi Astuti**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2121031030

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

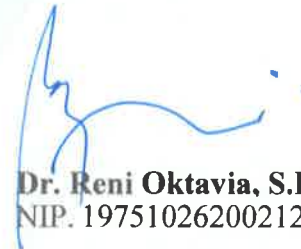
1. Komisi Pembimbing

Pembimbing 1



Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 197506202000122001

Pembimbing 2



Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 197510262002122002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi



Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 197506202000122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.**

Sekretaris : **Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt.**

Penguji : **Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA**

Anggota Penguji : **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **26 September 2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Astuti


NPM : 2121031030

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Analisis Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Indonesia” adalah benar hasil karya saya sendiri sesuai dengan arahan pembimbing. Dalam tesis ini tidak mengandung pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkannya nama penulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Hak intelektual dalam karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 September 2023

Penulis



Novi Astuti
NPM. 2121031030

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Astra Ksetra, Menggala pada 14 November 1977. Pada saat menempuh pendidikan pascasarjana, penulis bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini (2023).

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2021 dan berhasil lulus ujian komprehensif pada tanggal 26 September 2023.

MOTTO

“Setiap pencapaian yang berharga, besar atau kecil, memiliki tahapan pekerjaan yang melelahkan dan kemenangan; awal, perjuangan dan kemenangan”

(Gandhi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam teriring semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan tesis ini sebagai bukti nyata bahwa
“hasil tidak mengkhianati usaha”.

Semoga menjadi tauladan dan motivasi bagi ananda tercinta:

Walovi Lestari Nurrafa

&

Loveta Rihadatul Aisy

SANWACANA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Analisis Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Indonesia”**, yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga ke berbagai pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan di masa perkuliahan maupun proses penyusunan tesis, diantaranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Akuntansi dan sebagai dosen pembimbing utama yang telah memberikan motivasi, dukungan, waktu, arahan dan masukan selama bimbingan tesis.
5. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan waktu, arahan dan masukan selama bimbingan tesis.
6. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA., selaku dosen pembahas utama yang telah memberikan saran dan masukan pada saat seminar dan ujian tesis.
7. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembahas kedua yang telah memberikan saran dan masukan pada saat seminar, ujian dan penyelesaian tesis.

8. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA., selaku Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Dosen Program Study Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga memberikan ilmu pengetahuan, motivasi dan inspirasi yang berharga dalam penelitian, dan pembelajaran bagi penulis selama menempuh pendidikan.
10. Seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan maupun penyusunan tesis.
11. *My Boss* “Nyonyah” Donna dan seluruh teman-teman staff Subbag Keuangan dan Aset Bapenda Provinsi Lampung, yang telah memberikan *support* kepada penulis untuk melanjutkan studi pascasarjana.
12. Member “Mamak Nekad” (Depe, Selly), semoga aksi nekad kita berguna dan bermanfaat dimasa yang akan datang.
13. Seluruh teman-teman MIA 2021 dan semua pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan semoga Allah meridhoi, melimpahkan rahmat, berkah dan hidayah-Nya bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 30 September 2023

Novi Astuti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Kebaruan Penelitian	15
1.5 Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	19
2.1.2 Teori Stewardship	20
2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat	20

2.1.4	Otonomi Daerah.....	23
2.1.5	Pertumbuhan Ekonomi.....	24
2.1.6	Belanja Modal.....	28
2.2	Hipotesis Penelitian.....	29
2.3	Kerangka Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1	Jenis penelitian.....	35
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian.....	36
3.3.1	Populasi.....	36
3.3.2	Sampel.....	36
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	39
3.6	Analisis Data Penelitian.....	40
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	40
3.6.2	Analisis Verifikatif.....	41
3.7	Tehnik Analisis Data.....	41
3.7.1	Analisis Jalur (<i>path analysis</i>).....	41
3.7.2	Pengujian kelayakan model (<i>goodness fit of model</i>).....	42
3.7.3	Pengujian Hipotesis.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Statistik Deskriptif.....	47
4.2	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	49
4.2.1	Analisis Jalur Pengaruh Langsung (<i>Direct Effects</i>).....	49
4.2.2	Analisis Jalur Pengaruh Tidak Langsung (<i>Indirect Effects</i>).....	51
4.3	Uji Kelayakan Model (<i>Goodness Fit of Model</i>).....	51
4.4	Uji Hipotesis.....	52
BAB V PENUTUP.....		70
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Implikasi.....	72
5.2.1	Implikasi Teoritis.....	72
5.2.2	Implikasi Praktis.....	72
5.3	Keterbatasan dan Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....		74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Profil Kemiskinan di Indonesia (2011-2021)	4
Gambar 1.2	Grafik IPM dan Laju Pertumbuhan IPM (2015-2021)	6
Gambar 2.1	Kerangka Penelitian	34
Gambar 4.1	Analisis Jalur (<i>Direct Effects</i>)	50
Gambar 4.2	Grafik Derajat Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat ...	55
Gambar 4.3	Grafik Peningkatan Otonomi Daerah dan Belanja Modal	58
Gambar 4.4	Grafik Peningkatan Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi ..	60
Gambar 4.5	Grafik Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat (IPM)	62
Gambar 4.6	Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Penduduk Miskin Diatas Rata-rata Nasional.....	5
Tabel 1.2	Perkembangan IPM di Indonesia Tahun 2015-2021.....	6
Tabel 4.1	Ringkasan Pengambilan Sampel	46
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif.....	47
Tabel 4.3	Hasil Uji Analisis Jalur Pengaruh Langsung (<i>Direct Effects</i>).....	49
Tabel 4.4	Hasil Uji Analisis Jalur Pengaruh Tidak Langsung (<i>Indirect Effects</i>).....	51
Tabel 4.5	Hasil Uji Kelayakan Model (<i>Goodness Fit of Model</i>)	52
Tabel 4.6	Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung (<i>Direct Effects</i>).....	53
Tabel 4.7	Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung (<i>Indirect Effects</i>).....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah dimaksudkan untuk memperlancar pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai kesejahteraan (Arka & Yasa, 2015; Fajri et al., 2016; Kurniawati, 2022), cocok diterapkan di Indonesia yang sangat luas dan terbentuk atas wilayah kepulauan. Dalam prosesnya otonomi daerah mendorong munculnya Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui prosedur pemekaran dengan mempertimbangkan; bertambahnya jumlah penduduk, wilayah yang sangat luas, serta karakteristik dan potensi ekonomi yang beragam (Ambya, 2019).

Pembentukan DOB di Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk lebih dekat dengan penduduk setempat, yang memungkinkan informasi mengenai kebutuhan lokal lebih tepat, sehingga pelayanan publik lebih optimal. Dengan bertambahnya daerah otonomi baru diharapkan dapat memutus rantai panjang kendali pemerintah (birokrasi), sehingga pelayanan publik dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien. Dalam studi lintas negara oleh Martínez - Vázquez et al. (2017), menyatakan bahwa tren pengalihan kekuasaan fiskal, politik, dan administratif dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi diaplikasikan sebagai cara untuk mencari sektor yang lebih efisien dan lebih ramping. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih berkeadilan dan merata, serta meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan sektor kesehatan dan sektor pendidikan dalam rangka mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat adil dan makmur.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi diterapkannya sistem otonomi daerah menurut Kis-Katos & Sjahrir (2017) adalah tekanan internal dan eksternal yang memaksa negara berkembang untuk meningkatkan kekuasaan administratif, fiskal dan politik yang diberikan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Tekanan internal di Indonesia ditunjukkan dengan adanya gerakan pemisahan wilayah dari negara kesatuan sebagai dampak dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan terpusat atau sentralistik dan kesejahteraan yang tidak merata. Sedangkan tekanan eksternal berupa persaingan ekonomi global, yang menuntut struktur pemerintahan yang lebih baik agar mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif untuk menarik investor ke Indonesia.

Motivasi awal pemberlakuan otonomi di Indonesia dipengaruhi oleh guncangan ekonomi yang parah akibat krisis keuangan Asia Tenggara 1997/1998. Pemilihan demokratis pertama pada tahun 1999 menandai awal dari proses desentralisasi politik. Parlemen nasional yang baru terpilih menyetujui undang-undang desentralisasi pada bulan Mei 1999 (UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah), yang menetapkan lingkungan peraturan desentralisasi administratif, fiskal, dan politik. Dimana kekuasaan pemerintah didesentralisasikan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota.

Kedua undang-undang tersebut telah disempurnakan dengan beberapa kali revisi sesuai dengan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pada prinsipnya otonomi daerah merupakan wujud penataan daerah yang bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah (Pasal 31 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014).

Adapun kapan dimulai terselenggaranya otonomi daerah di Indonesia, didasarkan pada Rekomendasi MPR yang menetapkan bahwa bagi daerah yang mampu menjalankan otonominya secara penuh dapat segera melaksanakannya terhitung 1 Januari 2001 yang tercermin dalam APBN dan APBD (TAP MPR RI

No. IV/MPR/2000). Sampai dengan tahun 2022 (tidak termasuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, karena masih dalam tahap persiapan berupa perangkat daerah, gedung perkantoran, dll), diketahui keseluruhan daerah otonom yang ada di Indonesia adalah sebanyak 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota (<http://digi.web.id/kemendagri/>).

Dalam bukunya, Mardiasmo (2018)) menggambarkan konsep pembangunan daerah sebagai suatu upaya sistematis yang memadukan beberapa aspek kebijakan dari seluruh sektor yang ada. Menurutnya, pembangunan daerah ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang damai, demokratis, adil, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Jika menilik dari hasil pembangunan daerah yang dapat dirasakan dan dilihat secara kasat mata selama lebih dari dua dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, maka seharusnya hasil pembangunan di negara ini sudah dapat diakses dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan untuk kemudahan transportasi darat dan menunjang kegiatan lintas ekonomi dari satu wilayah ke wilayah lainnya, pembangunan gedung-gedung sekolah sebagai sarana pendidikan sampai di daerah terpencil, dan semakin banyaknya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), klinik, rumah sakit, balai pengobatan dan lain-lain, baik itu yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah maupun swasta yang menjamin kesehatan rakyat.

Akan tetapi, dalam sambutan Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Januari 2023 dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor, beliau mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di 14 provinsi masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Presiden mengingatkan bahwa target kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2024. Bagaimana cara mengatasinya dan intervensi apa yang dibutuhkan, menurutnya semua otoritas lokal paham apa yang harus dilakukan (<https://www.setneg.go.id/>).

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan perekonomian yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang ditaksir melalui pengeluaran atau konsumsi (Badan Pusat Statistik). Penduduk dikategorikan miskin apabila pengeluaran bulannya di bawah garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan

menggambarkan pengeluaran minimum seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik pangan (makanan) maupun non pangan (pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan) selama satu bulan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mempublikasikan data terkait Profil Kemiskinan di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2011-2021 pada 17 Januari 2022, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar dibawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1.1 Grafik Profil Kemiskinan di Indonesia (2011-2021)

Profil kemiskinan tersebut merilis tentang jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin secara nasional, yang dihitung oleh BPS berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode Maret dan September. Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa sampai dengan September tahun 2021 jumlah penduduk miskin masih berada di angka 26,50 juta jiwa dengan persentase penduduk miskin rata-rata nasional sebesar 9,71%. Grafik garis berwarna merah memotong grafik bar ditengah, membagi jumlah penduduk miskin menjadi dua yaitu persentase penduduk miskin lebih tinggi dari rata-rata nasional dan penduduk miskin lebih rendah dari rata-rata nasional. Itu artinya hampir 50% penduduk miskin berada diatas rata-rata nasional (kemiskinan ekstrem).

Besaran jumlah penduduk miskin dan presentase kemiskinan nasional disumbang oleh seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Jokowi sendiri tidak menyebutkan secara spesifik provinsi mana saja yang termasuk kategori kemiskinan ekstrem. Namun demikian, berdasarkan data kemiskinan periode September yang dihimpun oleh BPS terdapat 16 provinsi di Indonesia yang konsisten dengan angka kemiskinan diatas rata-rata angka kemiskinan nasional dalam sepuluh tahun terakhir (2012-2022). Adapun ke-16 provinsi tersebut antara lain:

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Diatas Rata-rata Nasional

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
NASIONAL	11,66	11,47	10,96	11,13	10,7	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57
PROVINSI:											
ACEH	18.58	17.72	16.98	17.11	16.43	15.92	15.68	15.01	15.43	15.53	14.65
SUMATERA SELATAN	13.48	14.06	13.62	13.77	13.39	13.10	12.82	12.56	12.98	12.79	11.95
BENGKULU	17.51	17.75	17.09	17.16	17.03	15.59	15.41	14.91	15.30	14.43	14.34
LAMPUNG	15.65	14.39	14.21	13.53	13.86	13.04	13.01	12.30	12.76	11.67	11.44
JAWA TENGAH	14.98	14.44	13.58	13.32	13.19	12.23	11.19	10.58	11.84	11.25	10.98
DI YOGYAKARTA	15.88	15.03	14.55	13.16	13.10	12.36	11.81	11.44	12.80	11.91	11.49
JAWA TIMUR	13.08	12.73	12.28	12.28	11.85	11.20	10.85	10.20	11.46	10.59	10.49
NUSA TENGGARA BARAT	18.02	17.25	17.05	16.54	16.02	15.05	14.63	13.88	14.23	13.83	13.82
NUSA TENGGARA TIMUR	20.41	20.24	19.60	22.58	22.01	21.38	21.03	20.62	21.21	20.44	20.23
SULAWESI TENGAH	14.94	14.32	13.61	14.07	14.09	14.22	13.69	13.18	13.06	12.18	12.30
SULAWESI TENGGARA	13.06	13.73	12.77	13.74	12.77	11.97	11.32	11.04	11.69	11.74	11.27
GORONTALO	17.22	18.01	17.41	18.16	17.63	17.14	15.83	15.31	15.59	15.41	15.51
SULAWESI BARAT	13.01	12.23	12.05	11.90	11.19	11.18	11.22	10.95	11.50	11.85	11.92
MALUKU	20.76	19.27	18.44	19.36	19.26	18.29	17.85	17.65	17.99	16.30	16.23
PAPUA BARAT	27.04	27.14	26.26	25.73	24.78	23.12	22.66	21.51	21.70	21.82	21.43
PAPUA	30.66	31.53	27.80	28.40	28.40	27.76	27.43	26.55	26.80	27.38	26.80

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas, terungkap apabila sebanyak 16 provinsi atau 47% dari 34 provinsi berada pada level kemiskinan ekstrem, yang artinya upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum yang tertuang dalam UUD 1945 masih belum tercapai.

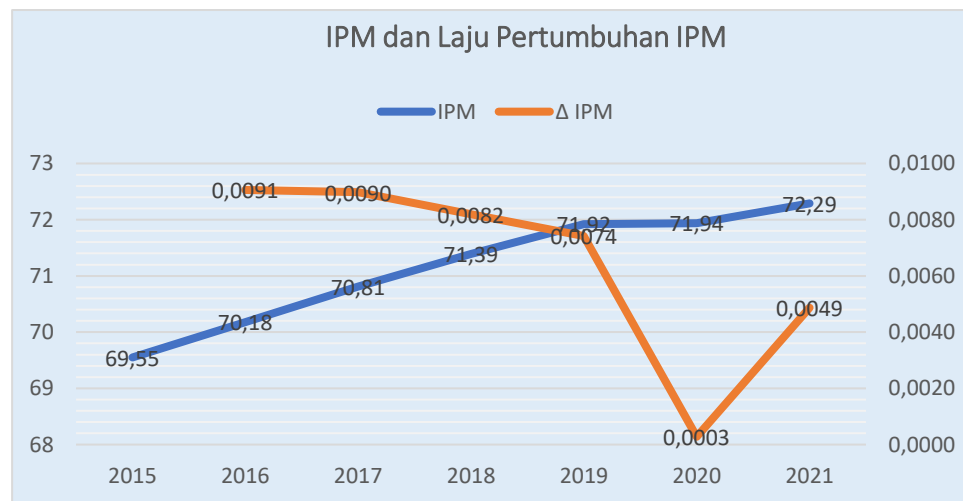
Kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan melalui implementasi sistem otonomi daerah. Tabel 1.2, menunjukkan data IPM sebagai proksi kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang menunjukkan peningkatan setiap tahun pada kurun waktu 2015 – 2021.

Tabel 1.2 Perkembangan IPM di Indonesia Tahun 2015-2021

PERIODE	IPM	Δ IPM
2015	69,55	-
2016	70,18	0,0091
2017	70,81	0,0090
2018	71,39	0,0082
2019	71,92	0,0074
2020	71,94	0,0003
2021	72,29	0,0049

Sumber: Data IPM (BPS) dan Δ IPM (olah data)

Namun angka IPM yang terus naik setiap periode tidak diikuti dengan kenaikan perubahan atau pertumbuhannya (Δ IPM = $(IPM_t - IPM_{t-1}) / IPM_{t-1}$). Apabila diamati dari sisi perubahannya (Δ IPM), maka sesungguhnya peningkatan kesejahteraan masyarakat cenderung melambat seperti yang diilustrasikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.2 Grafik IPM dan Laju Pertumbuhan IPM (2015-2021)

Dari grafik pada gambar 1.2 memperlihatkan bagaimana garis IPM (biru) dan garis Δ IPM (kuning) mempunyai arah yang berbeda. Meskipun pola garis IPM

naik keatas per tahun, sebaliknya pola garis pertumbuhan IPM justru turun kebawah. Hal ini memvisualkan apabila realitasnya adalah berdasarkan pertumbuhan IPM, peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia terus mengalami perlambatan. Berdasarkan fenomena tingkat kemiskinan ekstrem dan lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat diatas, pertanyaan mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini adalah apakah implementasi sistem otonomi daerah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setelah dua puluh tahun diterapkan di Indonesia.

Selain itu, pentingnya penelitian ini adalah terkait dengan maraknya usulan pembentukan DOB dari berbagai daerah. Sampai dengan September 2022, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melaporkan bahwa sebanyak 329 daerah mengusulkan pemekaran wilayah yang terdiri atas 55 provinsi, 247 kabupaten, dan 37 kota (<https://www.kompas.id/>). Terhadap fenomena dan latarbelakang diatas, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menentukan arah pembangunan untuk mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan terhadap pengambilan keputusan pencabutan moratorium pemekaran DOB.

Meskipun mereplikasi penelitian dari Badrudin & Siregar (2015), perbedaannya terletak pada jangka waktu pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Apabila penelitian sebelumnya bertujuan mengevaluasi otonomi daerah setelah satu dekade implementasi, sedangkan penelitian ini mungkin memperoleh hasil yang berbeda setelah dua dekade penerapan sistem otonomi daerah tersebut. Kemudian perbedaan dalam menentukan alat ukur belanja modal sebagai variabel intervening. Jika sebelumnya menggunakan logaritma natural nilai nominal belanja modal, kali ini peneliti menggunakan rasio yang menggambarkan proporsi realisasi belanja modal yang terakomodir terhadap keseluruhan realisasi belanja daerah. Rasio ini penulis anggap lebih tepat, karena dengan sistem otonomi setiap daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan anggaran belanja modal dan merealisasikannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerahnya masing-masing.

Otonomi dan desentralisasi telah menjadi salah satu strategi pembangunan dan reformasi sektor publik yang paling populer di antara negara-negara berkembang (Canare, 2022). Transformasi mekanisme redistribusi sumber daya keuangan untuk memastikan pembangunan ekonomi, menghasilkan perluasan gagasan desentralisasi dan memperkuat peran pemerintah daerah, dimana kewenangan fiskal baik itu pengelolaan pendapatan pajak maupun pembelanjanya menjadi kewenangan pemerintah daerah (Chygryn et al., 2018; Goel et al., 2017; Kis-Katos & Sjahrir, 2017; Mahi, 2016; Martínez - Vázquez et al., 2017).

Pemerintahan yang terdesentralisasi menawarkan keuntungan yang signifikan dalam hal efisiensi pengeluaran publik, yaitu lebih dekat dengan masyarakat dan dapat lebih memahami dan menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik konstituen. Disamping itu, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi tindakan pemerintah sehingga warga dapat mengamati dan mengawasi tindakan atau kinerja pemerintah daerah dengan lebih baik, serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan keuangan pemerintah daerah (Chygryn et al., 2018; Goel et al., 2017; Liu et al., 2017; Siregar & Badrudin, 2017).

Namun desentralisasi memiliki beberapa kerugian, diantaranya; berkontribusi terhadap peningkatan ketidakstabilan ekonomi makro karena kurangnya kontrol terpusat bersamaan dengan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer, berpotensi mengurangi pengawasan media atas tindakan pejabat publik (berpeluang untuk melakukan tindak korupsi), dan menyebabkan peningkatan ketimpangan regional (Chygryn et al., 2018; Goel et al., 2017; Liu et al., 2017).

Peran pemerintahan yang terdesentralisasi dalam mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang baik, telah menarik minat para pembuat kebijakan dan peneliti selama masa perkembangannya (Chygryn et al., 2018). Beragam riset terdahulu telah memperoleh temuan yang bervariasi dengan mengungkap keuntungan dan kerugian desentralisasi. Hal ini menarik minat peneliti untuk menganalisis peran pemerintah daerah di Indonesia, dalam mengeksplorasi potensi yang dimilikinya dalam bingkai implementasi otonomi daerah terhadap tingkat kesejahteraan

masyarakat. Selain itu untuk memperluas wawasan penelitian, peneliti menambahkan dua variabel mediasi yaitu; belanja modal sebagai variabel mediasi pertama dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi yang kedua.

Untuk menguji pengaruh implementasi otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, peneliti menggunakan populasi Daerah Tingkat II (kabupaten/kota) di negara Indonesia, dengan sampel masing-masing berjumlah 186 kabupaten dan 38 kota. Pemilihan kabupaten dan kota sebagai unit analisis didasarkan pada alasan Badrudin & Siregar (2015) bahwa kabupaten dan kota merupakan ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah. Dalam suatu riset, Liu et al. (2017) juga menyatakan bahwa ukuran yang akurat untuk mengukur desentralisasi fiskal dengan menggunakan data kabupaten, karena pemerintah provinsi mempunyai kebebasan untuk merancang kebijakan desentralisasi terhadap pemerintah daerah yang berada dalam batas wilayahnya. Sedangkan Canare (2021) berpendapat studi negara tertentu di tingkat pemerintah daerah lebih menantang, karena lebih sulit untuk membandingkan tingkat desentralisasi antar pemerintah daerah dari negara yang sama daripada membandingkan tingkat desentralisasi antar negara. Pemerintah daerah dari negara yang sama tunduk pada hukum nasional yang sama; dan di beberapa negara, pemerintah daerah memiliki sedikit kekuasaan.

Desentralisasi mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah dengan cakupan desentralisasi fiskal, politik, administrasi dan ekonomi (Kusuma, 2016; Mahi, 2016). Desentralisasi fiskal umumnya mewakili pengukuran otonomi daerah dan ditetapkan sebagai variabel independen yang patut diperiksa pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat (Badrudin, 2011; Badrudin & Kuncorojati, 2017; Canare, 2022). Kesejahteraan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan potensi serta sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan dimana rakyat menikmati hasil pembangunan dan memiliki kualitas hidup sesuai standar, baik itu dari segi penghasilan yang layak, umur panjang dan sehat, serta pendidikan formal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai proksi variabel dependen karena dianggap mampu mewakili ketiga komponen kriteria masyarakat yang sejahtera. Kajian tentang tingkat keberhasilan

otonomi daerah berbasis desentralisasi fiskal yang berkorelasi dengan tujuan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat masih menarik untuk diteliti, karena hasil yang berbeda-beda pada penelitian sebelumnya.

Menurut Badrudin (2011) tujuan otonomi belum berhasil karena pengeluaran publik yang tidak optimal mengakibatkan aktivitas perekonomian yang seharusnya berfungsi memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. Penelitian Yandri (2012) dalam mengevaluasi kebijakan otonomi dan kesejahteraan sosial di Kota Tangerang menunjukkan bahwa pengeluaran publik disektor pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sektor infrastruktur berpengaruh positif terhadap kesejahteraan.

Evaluasi desentralisasi di Indonesia yang dilakukan oleh Mahi (2016), menyoroti temuan tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Peningkatan ini merupakan dampak dari beberapa perbaikan dalam alokasi anggaran, terutama peningkatan porsi belanja anggaran untuk pendidikan dan kesehatan yang membuktikan jika peningkatan kesejahteraan adalah hasil dari desentralisasi. Layanan publik lainnya, terutama infrastruktur juga meningkat dari waktu ke waktu setelah desentralisasi.

Selanjutnya penelitian (Daud & Soleman, 2020) menguji pengaruh desentralisasi di Provinsi Maluku Utara terhadap IPM dengan sampel sebanyak 9 kabupaten/kota. Berdasarkan data yang dianalisis dengan teknik analisis jalur, menemukan bahwa IPM dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal dengan koefisien jalur positif pada tingkat probabilitas yang signifikan. Maknanya adalah semakin tinggi desentralisasi fiskal maka semakin tinggi IPM dan semakin besar signifikansinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian penelitian mengenai hubungan desentralisasi dan kesejahteraan yang dilakukan Canare (2022) menguji secara empiris hubungan antara ukuran desentralisasi dan tiga indikator kesejahteraan - pendapatan per kapita, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia. Menggunakan data panel dari sekitar 60 negara dari berbagai tingkat pendapatan selama periode sepuluh tahun dari 2006 hingga 2015. Hasil studi menunjukkan bahwa desentralisasi dikaitkan dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi; tetapi tidak ada hubungannya

dengan kemiskinan atau dengan HDI (*Human Development Indeks*). Selain itu, desentralisasi pendapatan memiliki hubungan paling kuat dengan pendapatan per kapita di antara ketiga ukuran desentralisasi yang diuji. Terdapat juga bukti bahwa manajemen yang baik memperkuat hubungan desentralisasi dan pendapatan per kapita secara positif; dan bahwa hubungan desentralisasi-kesejahteraan bervariasi antar tingkat pendapatan negara.

Penelitian Subroto & Baidlowi (2022) di Provinsi Jawa Timur, yang memanfaatkan analisis regresi berganda dengan jumlah sampel 38 kabupaten/kota, menemukan bahwa desentralisasi sumber pendanaan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah secara signifikan dan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Hasil penelitian menjelaskan jika daerah otonom mengatur sumber pendapatan fiskal dan pengeluaran yang efektif, maka pendanaan yang terdesentralisasi akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal dan pada akhirnya kesejahteraan penduduk Jawa Timur akan meningkat.

Pemerintah berperan dalam mengarahkan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan serta program dan kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien (Ayu & Septiani, 2019). Kendali pemerintah dalam proses pembangunan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mengandung muatan besaran dan tujuan penggunaan penetapan anggaran tersebut. Belanja modal infrastruktur adalah salah satu mata anggaran yang merupakan poin investasi terpenting yang secara langsung mempengaruhi aktivitas masyarakat serta dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan (Waryanto, 2017).

Sebagian peneliti meyakini jika pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur mampu untuk mencapai pemulihan ekonomi dimasa resesi ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat (Kim, 2018; Kim & Park, 2020; Kusuma, 2016). Namun ada pula beberapa peneliti yang mempunyai perspektif sebaliknya. Desentralisasi politik memungkinkan pejabat lokal mempengaruhi alokasi penganggaran belanja pengeluaran pemerintah daerah yang rentan terhadap tindak korupsi (Canare, 2022; Kis-Katos & Sjahrir, 2017). Hasil analisis secara empiris, penelitian ini diharapkan akan memberi bukti apakah belanja modal yan

dialokasikan pemerintah daerah di Indonesia mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan sosial.

Selanjutnya adalah penelitian Waryanto (2017), yang membuktikan bahwa meskipun belanja rutin tidak berdampak terhadap tumbuhnya perekonomian, tetapi sebaliknya belanja modal secara signifikan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian dan kesejahteraan. Demikian halnya dengan penelitian (Kim, 2018) mengenai pertumbuhan ekonomi di tingkat negara bagian AS, diketahui belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah kearah positif serta menyejahterakan masyarakat.

Salah satu konsep dasar implementasi kebijakan otonomi daerah yaitu untuk pemeratakan pembangunan ekonomi yang diestimasi dapat menstimulasi meningkatnya nilai tambah produk dan jasa yang dihasilkan oleh daerah dan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan penelitian Arka & Yasa (2015), Badrudin (2011), Badrudin & Siregar (2015) dan Kurniawati (2022), bahwa dengan desentralisasi fiskal ditemukan korelasi positif signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hasil ini dapat dibuktikan melalui derajat kemandirian daerah yang terus naik di setiap periode.

Uraian diatas setidaknya dapat memberikan pemahaman bahwa riset tentang keberhasilan otonomi daerah masih perlu untuk diteliti dan dikembangkan untuk menemukan rumusan yang tepat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya hasil temuan riset terdahulu yang menemukan kelebihan dan kekurangan desentralisasi fiskal, serta adanya fenomena tingkat kemiskinan ekstrem yang menghantui beberapa wilayah di Indonesia, penulis menetapkan judul tesis **“ANALISIS PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pemaparan fakta dan data pada uraian latar belakang diatas, menunjukkan Indonesia belum terbebas dari masalah kemiskinan. Tentu saja dengan tingginya angka kemiskinan, menjadi salah satu faktor penyebab kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan otonomi daerah masih belum tercapai. Konsep otonomi

daerah didasarkan pada asumsi bahwa daerah lebih memahami kebutuhannya dan mampu merancang program-program yang diperlukan untuk memajukan daerahnya. Akan tetapi bagaimana pemerintah daerah merancang strategi serta menerbitkan kebijakan berupa peraturan-peraturan dalam rangka meningkatkan jumlah PAD, dan bagaimana pemerintah daerah merencanakan pengeluarannya untuk mengoptimalkan pelayanan publik serta mendorong penggalan potensi pendapatan, menjadi tugas utama para pemimpin daerah otonom selaku agen rakyat.

Proses pembangunan daerah tidak akan terlaksana sepenuhnya tanpa peran serta seluruh pemangku kepentingan di daerah, khususnya masyarakat. Masyarakat yang mandiri dan otonom adalah masyarakat yang bebas menentukan pilihannya berdasarkan apa yang dibutuhkan dan dirasakan, seperti memilih pemimpin daerah dan merumuskan kebijakan. Integrasi partisipasi masyarakat dan kemampuan pemimpin daerah dalam merumuskan kebijakan pendapatan dan belanja akan berdampak pada peningkatan aktivitas perekonomian. Peningkatan kegiatan perekonomian juga akan berdampak pada peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan diharapkan kebahagiaan masyarakat dapat terwujud.

Dengan beragamnya hasil penelitian terdahulu mengenai keefektifan sistem otonomi daerah, fokus penelitian ini adalah memanfaatkan informasi akuntansi yang tersedia di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menguji pengaruh derajat otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah kabupaten/kota provinsi Lampung. Adapun rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang ingin dicari jawabannya adalah:

- 1) Apakah otonomi daerah secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat;
- 2) Apakah otonomi daerah secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal;
- 3) Apakah otonomi daerah secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat;
- 4) Apakah belanja modal secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat;

- 5) Apakah pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat;
- 6) Apakah otonomi daerah secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi.
- 7) Apakah otonomi daerah secara tidak langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal.

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini bertujuan utama untuk mendapatkan pembuktian apakah upaya penataan wilayah dengan menerapkan sistem otonomi daerah selama lebih dari dua dekade, mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, setelah penelitian ini selesai dilakukan peneliti berharap dapat menjawab rumusan masalah diatas dengan cara:

- 1) Menemukan bukti empiris apakah sistem otonomi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menguji dan menganalisis hubungan antara otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Menemukan bukti empiris apakah sistem otonomi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dengan menguji dan menganalisis hubungan antara otonomi daerah dan belanja modal.
- 3) Menemukan bukti empiris apakah sistem otonomi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menguji dan menganalisis hubungan antara otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi.
- 4) Menemukan bukti empiris apakah belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menguji dan menganalisis hubungan antara belanja modal dan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Menemukan bukti empiris apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menguji dan menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menemukan bukti empiris apakah sistem otonomi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan

ekonomi, dengan menguji dan menganalisis hubungan antara otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

- 7) Menemukan bukti empiris apakah sistem otonomi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal, dengan menguji dan menganalisis hubungan antara otonomi daerah, belanja modal dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Kebaruan Penelitian

Pada dasarnya penerapan sistem otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia merupakan cara yang tepat untuk mengatur suatu daerah. Namun evaluasi perlu dilakukan untuk menilai keefektifan dari sistem tersebut karena pada kenyataannya tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan belum sepenuhnya tercapai. Badrudin & Siregar (2015) telah melakukan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah terhadap 461 kabupaten kota periode 2006-2013. Adapun kebaruan dari penelitian ini dengan riset sebelumnya adalah:

- a. Sistem otonomi daerah resmi diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 2001. Jika penelitian sebelumnya dilakukan setelah lebih dari satu dekade implementasi otonomi daerah (2001-2015), maka sepanjang tinjauan literasi peneliti belum pernah ada penelitian yang memperbaharui evaluasi otonomi daerah selama enam tahun terakhir (2016-2021). Dimana ada beberapa daerah yang telah mengalami perluasan atau pemekaran, sehingga jumlah populasi bertambah menjadi 508 kabupaten kota dan belum ada riset yang mengupdate mengenai penambahan jumlah populasi ini.
- b. Perbedaan dalam menentukan ukuran variabel intervening sebagai pemediasi variabel independen terhadap variabel dependen. Jika penelitian rujukan menggunakan logaritma natural nilai nominal belanja modal, kali ini peneliti menggunakan perbandingan atau rasio yang menggambarkan proporsi realisasi belanja modal yang terakomodir terhadap keseluruhan realisasi belanja daerah setiap periode. Peneliti berpendapat bahwa rasio ini lebih tepat untuk digunakan, karena pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai keberhasilan pembangunan jangka panjang tidak hanya dalam meningkatkan nilai rupiah belanja modal tetapi juga dalam meningkatkan proporsinya terhadap total belanja daerah (Nurhidayati &

Yaya, 2013). Alasannya lainnya adalah kewenangan setiap pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang diprioritaskan. Sehingga ukuran rasio yang menggambarkan proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah, lebih memiliki makna nilai analisis untuk dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Studi literatur yang dilakukan oleh Canare (2021) dalam artikel *“Decentralization and Development Outcomes: What Does the Empirical Literature Really Say”* menemukan bahwa tujuan dari banyak implikasi program desentralisasi sistem otonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Meskipun demikian, menurutnya tidak banyak literatur empiris yang mengulas tentang hubungan desentralisasi dengan hasil kesejahteraan aktual. Oleh karena itu, penelitian ini diprediksi bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dampak otonomi melalui desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Secara umum signifikansi dari riset ini, peneliti berharap dapat menjadi bagian dari perkembangan ilmu akuntansi, dan secara khusus topik mengenai desentralisasi fiskal dapat menambah referensi penelitian akuntansi sektor publik yang masih sangat sedikit (2% dari total topik penelitian akuntansi jurnal bereputasi di Indonesia/SINTA), sebagaimana telah diklasifikasikan oleh Rizky & Setiawan (2019) dalam daftar topik penelitian akuntansi sektor publik. Berikut ini poin-poin manfaat hasil penelitian yang diinginkan oleh peneliti:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan pada penelitian berikutnya, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menilai dan mengkaji kebijakan pemerintah dalam penataan daerah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah, dalam menyikapi maraknya usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan perlu tidaknya pencabutan moratorium (penundaan/penangguhan) pemekaran DOB.

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau gagasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan. Yaitu pentingnya alokasi sumber daya yang efektif, efisien dan ekonomis, agar dapat mendorong penerimaan pendapatan asli daerah dengan hasil yang maksimal serta melayani kebutuhan masyarakat secara optimal dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat meningkat dengan cepat.
- 4) Hasil penelitian ini sangat mungkin menjadi masukan bagi investor ketika mengestimasi pengambilan keputusan untuk berinvestasi, dan menarik minat untuk turut berperan membangun perekonomian daerah serta berpartisipasi dalam menyejahterakan rakyat. Dengan melihat sejauh mana pengaruh kebijakan pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan di wilayahnya serta menciptakan perekonomian yang kondusif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Terselenggaranya otonomi daerah di Indonesia yang dimulai setelah keterpurukan perekonomian akibat krisis ekonomi dan kepercayaan pada tahun 1998, membuka jalan bagi munculnya reformasi yang menyeluruh, yaitu: terwujudnya masyarakat adil dan makmur, terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkembangnya model pembangunan yang berkeadilan (Mardiasmo, 2018).

Dalam konteks negara kesatuan, Supriyatno (2021) berpendapat bahwa kebijakan pemberian otonomi kepada daerah merupakan kebijakan tipikal yang dilakukan di Indonesia. Di sini otorisasi didasarkan pada beberapa alasan:

1. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemberian otonomi pada hakekatnya merupakan ekspresi rakyat yang berdaulat sebagai suatu bangsa yang merdeka dan bukan kedaulatan kelompok masyarakat tertentu saja.
2. Kebutuhan masyarakat yang heterogen dan jauh secara geografis tidak memungkinkan pemerintah mengatur dan mengelola pemerintahan secara terpusat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penyebab pemerintah pusat memberlakukan desentralisasi kekuasaan kepada daerah adalah supaya daerah-daerah tersebut dapat lebih efektif dan juga efisien dalam merespon kepentingan dan aspirasi penduduk setempat. Adapun konsep ini telah dirumuskan sebelumnya oleh Oates (1972) dalam “Teorema Desentralisasi”, dimana dengan menyesuaikan penyediaan barang publik dengan preferensi (hak untuk didahulukan atau diutamakan/prioritas) penduduk lokal, desentralisasi

berpotensi meningkatkan kesejahteraan dibandingkan dengan pengaturan terpusat, yang cenderung menyediakan barang publik secara seragam untuk semua wilayah.

Dalam penelitian antar negara, Canare (2021) berpandangan jika otonomi daerah dan desentralisasi telah menjadi komponen umum dari strategi pembangunan dan reformasi keuangan publik di antara negara berkembang. Menurutnya argumen utama untuk desentralisasi adalah mendekatkan penyediaan barang publik kepada penggunaannya dapat mendorong efisiensi yang lebih besar, tata kelola yang lebih baik, dan akuntabilitas.

Beberapa perspektif mengenai otonomi dan desentralisasi diatas memperkuat dukungan terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia, sebagai negara kesatuan yang sedang berkembang.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency teory atau teori keagenan dijabarkan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai suatu hubungan antara pemilik (*principal*) dan manager (*agent*) untuk melakukan sesuatu hal, yang berkaitan dengan pemberian otorisasi dari prinsipal kepada agen dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan prinsipal. Teori keagenan dalam organisasi sektor publik tampak dari hubungan antara rakyat selaku *principal* dan pemerintah selaku *agent*. Dapat dijelaskan jika dalam suatu negara, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang diwakili oleh parlemen (Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR), yang mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan asas demokrasi demi kemaslahatan bersama.

Dalam sistem sentralisasi terdapat asimetri informasi antara pemerintah pusat dan rakyat yang ada di daerah. Karena informasi penting mengenai kebutuhan rakyat di masing-masing daerah tidak dapat terserap dan terakomodir dengan baik. Selain terhalang oleh letak geografis, perbedaan karakteristik tiap-tiap daerah dengan corak, adat dan budaya yang berbeda-beda menegaskan jika kebutuhan mereka tidaklah sama. Untuk dapat mengurangi asimetri informasi, kebijakan otonomi daerah dengan pola desentralisasi diimplementasikan. Dengan harapan pembangunan dapat lebih merata dan kesejahteraan rakyat dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.1.2 Teori Stewardship

Stewardship theory dideskripsikan sebagai kondisi dimana steward tidak mementingkan keinginan pribadi tetapi lebih mengutamakan keinginan prinsipal (Donaldson & Davis, 1991). Menurut Kiswanto & Fatmawati (2019) teori stewardship adalah teori yang menjelaskan situasi dimana manajer tidak termotivasi oleh tujuan pribadi, tetapi lebih fokus ditujukan pada sasaran utama bagi kepentingan perusahaan. Bila dikaitkan dengan bidang pemerintahan, pemerintah bertindak sebagai steward atau agen yang mengelola sumber daya dan rakyat bertindak selaku prinsipal yang memiliki sumber daya (Ayu & Septiani, 2019). Pemerintah berupaya untuk mencapai tujuan bersama yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat dan jika belum berhasil berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mewujudkannya (A. P. Handayani & Badrudin, 2019).

Dalam penelitian ini, penulis berasumsi pemerintah menerapkan kebijakan implementasi otonomi daerah agar keinginan rakyat untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan dapat terwujud. Apabila keinginan ini dapat dipenuhi oleh pemerintah, maka kepuasan dan kepercayaan rakyat selaku pemilik terhadap kinerja pemerintah akan meningkat. Dengan kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, steward berpeluang untuk merancang strategi demi dan hanya difokuskan bagi kepentingan prinsipal. Pembuktiannya adalah berupa perkembangan dan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat, yang telah diupayakan oleh pemerintah daerah.

2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat sebagai barometer keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan memerlukan suatu instrumen pengukuran. Sebelumnya kesejahteraan masyarakat diprediksi dengan pendekatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Tetapi dalam penelitian Supriyatno (2021), ia mengatakan bahwa di berbagai kalangan penggunaan PDB per kapita sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat menimbulkan kontroversi. Hal ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara angka dan realita kesejahteraan yang ada di masyarakat.

Masih menurut Supriyatno (2021), kecenderungan terkini mengartikan bahwa konsepsi masyarakat sejahtera di suatu daerah diartikan sebagai kondisi

tercapainya hidup yang berkualitas baik atau terpenuhinya kebutuhan pokok manusia. Beberapa artikel penelitian telah merekomendasikan instrumen paling tepat untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial, dikenal dengan nama Indeks Pembangunan Manusia disingkat IPM (Badrudin, 2011; Nashshar & Mulyana, 2022; Yandri, 2012). IPM mampu menggambarkan keadaan masyarakat yang menikmati hasil pembangunan berupa pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pendapatan untuk kehidupan yang layak di suatu wilayah atau negara, dan dianggap sebagai komponen dasar yang tepat untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat (Badrudin, 2011; Badrudin & Siregar, 2015; Daud & Soleman, 2020).

IPM atau *Human Development Index (HDI)* diperkenalkan pada tahun 1990 oleh *United Nations Development Programs (UNDP)*, yaitu Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterbitkan secara berkala dalam *Human Development Report (HDR)* setiap tahun. Badan Pusat Statistik mendefinisikan HDI sebagai ukuran sejauh mana masyarakat mempunyai akses terhadap hasil dari pembangunan dalam hal penghasilan, kesehatan dan pendidikan. IPM terbentuk dari 3 (tiga) komponen dasar:

- a. Umur yang panjang dan hidup sehat
- b. Berpendidikan formal
- c. Berpenghasilan cukup untuk membiayai pengeluaran pokok

Rumus untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut:

➤ **Dimensi Kesehatan**

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

Dimana:

$I_{\text{kesehatan}}$ = Indeks Kesehatan; AHH_{\min} = Angka Harapan Hidup Minimal

AHH = Angka Harapan Hidup; AHH_{\max} = Angka Harapan Hidup Maksimal

➤ **Dimensi Pendidikan**

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

Dimana:

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

$I_{\text{pendidikan}}$ = Indeks Pendidikan

I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah

I_{RLS} = Indeks Rata-rata Lama Sekolah

➤ **Dimensi Pengeluaran**

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{L_n(\text{pengeluaran}) - L_n(\text{pengeluaran}_{\min})}{L_n(\text{pengeluaran}_{\max}) - L_n(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Dimana:

$I_{\text{pengeluaran}}$ = Indeks Pengeluaran

$L_n(\text{pengeluaran})$ = Logaritma Natural Pengeluaran

$L_n(\text{pengeluaran}_{\min})$ = Logaritma Natural Pengeluaran Minimal

$L_n(\text{pengeluaran}_{\max})$ = Logaritma Natural Pengeluaran Maksimal

➤ **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Dimana:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

$I_{\text{kesehatan}}$ = Indeks Kesehatan

$I_{\text{pendidikan}}$ = Indeks Pendidikan

$I_{\text{pengeluaran}}$ = Indeks Pengeluaran

Konsep kesejahteraan masyarakat terintegrasi dalam kuantitas dan kualitas hidup pembangunan manusia, dengan memadukan aspek kesehatan dan pendidikan serta standar penghidupan yang layak. Nilai IPM adalah berkisar antara 0 - 100 dengan kategori pembangunan manusia dianggap rendah bila IPM < 50; menengah kebawah bila IPM 50 – 65,9; dan menengah keatas bila IPM 66 – 79,9 (Siregar & Badrudin, 2017).

Masyarakat sejahtera dikaitkan dengan konsep pembangunan manusia sepenuhnya yang menginginkan penguatan kemampuan dasar hidup masyarakatnya, baik jasmani, rohani dan spritual. Pada saat yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menafsirkan upaya peningkatan kualitas dasar tersebut dengan menggunakan indikator angka harapan hidup, perkiraan lama sekolah, dan belanja konsumen. Otonomi ditujukan sebagai sarana untuk memenuhi peningkatan kualitas hidup tersebut.

2.1.4 Otonomi Daerah

Setelah sebelumnya menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi, pada tanggal 1 Januari 2001 menjadi awal mula diselenggarakannya otonomi daerah di Indonesia. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014). Undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut juga mendasari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Tidak terkecuali Indonesia, banyak negara yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pendanaan yang berpusat pada pemerintah pusat (Subroto & Baidlowi, 2022). Melambatnya pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Implementasi otonomi daerah diharapkan menjadi solusi untuk mencegah kekhawatiran tersebut. Dimana desentralisasi berkaitan dengan cara mengelola keuangan, cara merencanakan perekonomian, termasuk cara menyusun program pembangunan daerah dan rencana lain yang dilimpahkan ke daerah oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal biasanya melibatkan transfer sejumlah besar kewenangan anggaran ke tingkat pemerintah daerah dengan perluasan

kemampuan keuangan mereka secara simultan (Chygryn et al., 2018). Teori ini sebelumnya telah dikemukakan oleh Oates yang berpendapat bahwa informasi yang lebih baik dimiliki oleh pemerintah daerah mengenai preferensi konstituennya, sehingga pemerintah dapat merancang layanan publik dengan lebih baik untuk menanggapi kebutuhan daerah yang seringkali berbeda dengan daerah lain.

Desentralisasi fiskal sebagai elemen utama dari otonomi daerah, memberikan keleluasaan kepada daerah otonom untuk membuat keputusan pengeluaran sektor publik Yandri (2012) dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, keputusan tersebut harus didukung oleh pemerintah pusat, seperti subsidi/bantuan dan pinjaman pemerintah pusat, serta pendanaan lain yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun penyertaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak (Daud & Soleman, 2020).

Dalam studi literatur, penulis menemukan jika pemerintah daerah dianggap benar-benar otonom jika dapat melaksanakan program pembangunan tanpa ketergantungan yang berlebihan kepada pemerintah pusat. Kemampuan mendanai program pembangunan secara mandiri tercermin dari derajat desentralisasi yang diprediksi dengan total belanja, pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil (Siregar & Badrudin, 2017). Penelitian lain juga mengukur derajat desentralisasi fiskal di provinsi dengan mempertimbangkan desentralisasi pengeluaran dan desentralisasi pendapatan secara bersamaan (Liu et al., 2017).

Sedangkan menurut Martinez-Vazquez et al. (2017) pengukuran desentralisasi dalam literatur ekonomi dan politik masih menuai perdebatan. Menurutnya, sebagian besar penelitian pada umumnya mengukur desentralisasi fiskal berdasarkan pada konsep; pendapatan asli daerah yang meningkat, otonomi atas keputusan pengeluaran atau belanja, hibah nasional yang dibelanjakan secara lokal atau bahkan jumlah dan ukuran pemerintah daerah.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Definisi pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya perubahan kondisi perekonomian yang diharapkan menuju kearah yang lebih baik di suatu wilayah secara terus menerus, selama kurun waktu tertentu adalah merupakan deskripsi dari pertumbuhan ekonomi (Purnamawati & Yuniarta, 2021). Keberhasilan suatu

negara tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonominya, sehingga penting untuk memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan yang berkelanjutan karena ini merupakan indikator keberhasilan penyelenggaraan negara, pemerintahan dan aparatur dalam membangun kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bagi rakyatnya.

Pertumbuhan ekonomi nasional adalah akumulasi dari pertumbuhan regional (daerah). Ini berarti apabila pertumbuhan ekonomi regional baik maka pertumbuhan ekonomi nasional akan menjadi baik pula. Perekonomian suatu daerah akan bertumbuh mengikuti peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, yang berdampak pada pertumbuhan produksi barang dan jasa serta pendapatan pada daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi daerah adalah persentase perubahan kemampuan suatu daerah untuk menyuplai barang publik kepada penduduknya dari satu periode terhadap periode sebelumnya.

BPS telah mempublikasikan pertumbuhan ekonomi regional berdasarkan PDRB yaitu Produk Domestik Regional Bruto yang menggambarkan situasi perekonomian dan pertumbuhan ekonomi secara makro masing-masing daerah. PDRB merupakan ukuran pendapatan daerah yang diperoleh dari total produk baik itu barang maupun jasa akhir yang diproduksi oleh semua entitas dalam jangka waktu tertentu. Ada tiga metode pendekatan perhitungan PDRB yaitu; produksi, pengeluaran dan pendapatan.

Pertumbuhan PDRB pendekatan pengeluaran, umum digunakan untuk menetapkan pertumbuhan ekonomi daerah ataupun negara. Mengutip dari BPS, PDRB pengeluaran adalah jumlah produk akhir yang di konsumsi konsumen yang diklasifikasikan sebagai:

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang didapatkan dari; pembelian, barter, kompensasi tenaga kerja dari pemberi kerja dan barang/jasa yang dibuat untuk digunakan sendiri.

2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)

Konsumsi LNPRT merupakan pengeluaran organisasi yang menggratiskan

produk barang dan jasa kepada rumah tangga atau anggotanya, yang tidak dikendalikan oleh pemerintah.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)

Konsumsi Pemerintah merupakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk konsumsi akhir, terdiri dari pengeluaran konsumsi kolektif dan pengeluaran konsumsi individu. Pengeluaran konsumsi kolektif adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa diakses seluruh masyarakat, contoh jasa pertahanan dan keamanan oleh TNI/Polri. Sedangkan Pengeluaran Konsumsi Individu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa yang terbatas jumlahnya dan hanya dapat dikonsumsi apabila memenuhi syarat tertentu (biasanya harga), contoh pelayanan kesehatan di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas.

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Terkecuali kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

5. Perubahan Inventori

Inventori didefinisikan sebagai aset berupa barang dan jasa yang disimpan untuk kemudian dijual, digunakan dalam kegiatan produksi atau penggunaan lainnya di waktu mendatang. Inventori dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu: bahan baku dan penolong, barang dalam penyelesaian, barang jadi, barang/jasa untuk dijual kembali dan persediaan/inventori militer.

6. Ekspor-Import

Deskripsi ekspor-import adalah pengalihan kepemilikan atas barang dan jasa antara residen (pelaku ekonomi dalam negeri) dengan non-residen (pelaku ekonomi luar negeri). Ekspor dan impor menggunakan metode pencatatan akrual, dimana barang dicatat pada saat perpindahan kepemilikan sesuai batas waktu yang tertera pada dokumen pabean, sedangkan jasa dicatat pada saat jasa diberikan.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia daerah dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang diukur atas dasar harga tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah atas barang dan jasa tersebut yang diukur atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menentukan ketersediaan sumber daya ekonomi, variabilitas dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB konstan digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi riil tahunan atau tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di daerah adalah sebagai berikut:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100$$

Dimana:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB_t = Pendapatan Riil Regional pada Tahun Tertentu

PDRB_{t-1} = Pendapatan Riil Regional pada Tahun Sebelumnya

Daud & Soleman (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan alokasi sumber daya. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal setidaknya memiliki tiga aspek;

1. Pertumbuhan dipandang sebagai tujuan desentralisasi fiskal dan alokasi dana publik yang efisien.
2. Pemerintah berusaha melakukan berbagai langkah untuk mendorong pendapatan per kapita yang lebih tinggi.

3. Dibandingkan indikator ekonomi lainnya, pertumbuhan PDRB tidak sulit untuk ukur dan diinterpretasikan.

2.1.6 Belanja Modal

Otonomi bukan hanya menitik pusatkan pada pelimpahan kewenangan, tetapi juga sejauh mana daerah bertanggung jawab dan mampu melaksanakan kewenangan tersebut. Desentralisasi pengeluaran merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mendistribusikan sumber daya fiskal sesuai dengan prioritas kebutuhan pelayanan publik, salah satunya dalam bentuk belanja investasi atau belanja aset atau belanja modal. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan untuk menambah aset guna meningkatkan sarana dan prasarana umum yang hasilnya dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat (Nurhidayati & Yaya, 2013).

Belanja modal meliputi belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan; belanja perolehan tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja aset tak berwujud, dan belanja aset tetap lainnya. Anggaran dan realisasi belanja modal pada masing-masing kabupaten atau kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD.

Menurut PSAP 71 Tahun 2010 pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung, dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tak berwujud, dan aset tetap lainnya. Anggaran dan realisasi belanja modal pada masing-masing kabupaten atau kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD. Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dijelaskan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
- pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

2.2 Hipotesis Penelitian

Dalam implementasi otonomi daerah, Indonesia telah mengadopsi prinsip “uang mengikuti fungsi”. Arti dari prinsip tersebut adalah setiap pendelegasian wewenang dan fungsi, juga menuntut penyediaan sumber daya keuangan agar wewenang dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan. Menurut Mahi (2016) fungsi-fungsi tersebut pertama-tama didesentralisasi dan kemudian diikuti oleh alokasi fiskal untuk membiayai fungsi-fungsi yang didesentralisasi tersebut. Siregar & Badrudin (2017) mengatakan bahwa prinsip ini wajib diikuti agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Pembagian fungsi pemerintahan dan tanggung jawab birokrasi di setiap daerah relatif sama. Namun keberhasilan pelaksanaan otonomi mungkin berbeda yang dapat disebabkan oleh kondisi daerah, efektivitas kepemimpinan, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta kemampuan menggali sumber-sumber pendapatan.

Penelitian sebelumnya mengenai evaluasi implementasi otonomi daerah, diperlukan untuk mengetahui sejauh mana dampak desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat (Badrudin, 2011). Penelitian empiris berikutnya oleh Badrudin & Siregar (2015), menemukan bukti otonomi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Teorema desentralisasi Oates mengutarakan bahwa dengan adanya preferensi kebutuhan yang beragam, penyediaan layanan publik oleh struktur pemerintahan yang terdesentralisasi umumnya akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan warga negara (Canare, 2021; Martínez-Vázquez et al., 2017). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Otonomi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

Berlakunya sistem otonomi memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki (Wandira, 2013). Pengembangan potensi hanya dapat dilaksanakan jika didukung oleh pendanaan yang memadai, salah satunya melalui akun belanja modal. Idealnya, alokasi belanja modal direncanakan, disusun dan di anggarkan berdasarkan usulan atau partisipasi penduduk setempat sesuai dengan kemampuan daerah tersebut untuk membiayai pengeluarannya. Hasil pengujian Badrudin & Siregar (2015), menunjukkan variasi

variabel otonomi daerah mempunyai hubungan kausalitas yang positif signifikan terhadap variasi belanja modal. Secara sederhana, desentralisasi fiskal berarti memberdayakan sumber lokal untuk memungut pajaknya sendiri, dan mendistribusikannya untuk pengeluaran serta kegiatan investasi (Subroto & Baidlowi, 2022). Menurut model ekonomi makro, pemerintah daerah dapat mendorong perekonomian dengan meningkatkan pengeluaran termasuk belanja modal (Kim & Park, 2020). Di dukung oleh teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis yang kedua dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Otonomi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal

Desentralisasi fiskal menarik untuk dibahas setelah Indonesia menerapkan otonomi daerah. Kajian Rustan (2013) meneliti pengaruh desentralisasi fiskal dan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan analisis data panel dan analisis filter Hodrick-Prescott. Temuan tersebut memperkuat teori desentralisasi Oates dan teori sebelumnya bahwa desentralisasi fiskal berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ditemukan juga bahwa pelaksanaan kebijakan otonomi daerah (efek desentralisasi penuh) memiliki korelasi positif yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Canare (2021) secara kritis meninjau literatur empiris tentang desentralisasi dan hubungannya dengan hasil pembangunan. Analisis Canare menunjukkan bahwa desentralisasi pendapatan dan kemandirian fiskal, atau kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka sendiri daripada mengandalkan transfer pemerintah pusat, adalah jenis desentralisasi yang paling positif terkait dengan hasil pembangunan. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori diatas, dugaan atau asumsi penelitian ketiga dirumuskan sebagai:

H₃ : Otonomi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Kewenangan otonomi yang sebenarnya adalah keleluasaan daerah untuk menjalankan hak dan wewenangnya pada bidang-bidang tertentu yang nyata-nyata ada dan diperlukan tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Desentralisasi

fiskal bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan jika pemerintah daerah ingin mewujudkannya, maka anggaran belanja langsung terutama belanja modal harus ditingkatkan (Badrudin, 2011).

Belanja modal digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang akan memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi dan non ekonomi (seperti; fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, sekolah, rumah sakit, pasar dan fasilitas umum lainnya) yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Badrudin, 2011). Penelitian Mirza (2012) dengan sampel 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk belanja modal, berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan belanja modal sebagai belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok operasional. Atribusi belanja modal sangat penting karena berkontribusi pada ekonomi lokal secara bertahap, yaitu; tahap jangka pendek berupa pengeluaran material dan serapan tenaga kerja; dan tahap jangka panjang melalui multiplier pihak swasta dalam perekonomian daerah (Kim, 2018).

Sebagai kesimpulan awal dapat dinyatakan bahwa belanja modal akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengeluaran publik berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Yandri, 2012). Di dukung oleh penelitian Waryanto (2017) bahwasannya belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memicu kesejahteraan. Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

Pertumbuhan ekonomi di dorong oleh kenaikan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Data Bappenas 2012-2019 menunjukkan

peningkatan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu berbanding lurus dengan meningkatnya PDRB Per Kapita masing-masing kabupaten/kota di Indonesia. Peningkatan penghasilan masyarakat menyebabkan meningkatnya konsumsi atau daya beli kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier sehingga masyarakat lebih sejahtera, lebih sehat dan berpendidikan. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penelitian empiris membuktikan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM memiliki koefisien positif dengan tingkat probabilitas yang signifikan (Daud & Soleman, 2020; Sasana, 2009). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi IPM. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya disusun hipotesis sebagai berikut;

H₅ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

Otonomi daerah adalah tentang kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Konsep otonomi daerah didasarkan pada asumsi bahwa daerah lebih memahami kebutuhannya dan mampu membuat program-program yang diperlukan untuk memajukan daerahnya (Badrudin & Siregar, 2015). Oleh sebab itu diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lebih efektif dan efisien. Beberapa peneliti menyimpulkan jika implementasi sistem otonomi daerah dimaksudkan untuk memperlancar pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai kesejahteraan (Arka & Yasa, 2015; Fajri et al., 2016; Kurniawati, 2022).

Desentralisasi sumber pendanaan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah secara signifikan dan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan kegiatan ekonomi lokal secara substansial dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur secara signifikan (Subroto & Baidlowi, 2022). Pernyataan ini mendasari dugaan penelitian sebagaimana berikut ini:

H₆ : Otonomi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi

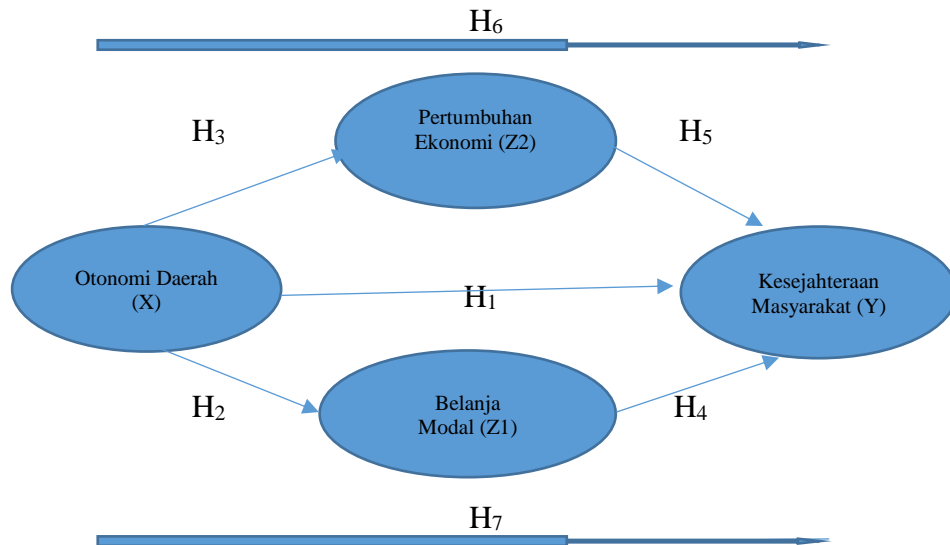
Berlandaskan asas otonomi, pemerintah daerah dapat menentukan arah pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekonomian melalui belanja modal. Dengan penambahan infrastruktur dan pemeliharaan diharapkan mampu merangsang keikutsertaan masyarakat dalam roda perekonomian daerah demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Belanja modal berkaitan dengan investasi tetap sektor publik dan menjadi salah satu titik fokus kebijakan pemerintah (Siregar & Badrudin, 2017).

Beberapa penelitian membuktikan jika kegiatan investasi pemerintah daerah berupa belanja modal yang efektif, berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menengah. Dimana alokasi belanja modal tahun sebelumnya akan berdampak pada tahun berikutnya yang disebabkan karena belanja modal yang dianggarkan pada tahun sebelumnya pemanfaatannya akan digunakan pada tahun selanjutnya (Aryawati & Sudana, 2018; Kim, 2018; Kim & Park, 2020). Belanja modal yang tepat sasaran akan memotivasi aktivitas ekonomi sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat dan kesejahteraan terpenuhi. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang menjelaskan hubungan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal yaitu;

H₇ : Otonomi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian adalah konsep penelitian yang menghubungkan visualisasi satu variabel dengan variabel lainnya. Kerangka pemikiran atau model penelitian pada riset ini sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1 diatas adalah diagram jalur yang menunjukkan efek dari kerangka acuan studi, yaitu; apakah variabel eksogen secara langsung mempengaruhi variabel endogen dan apakah variabel eksogen secara tidak langsung mempengaruhi variabel endogen melalui variabel mediasi (intervening).

Kerangka penelitian dibangun di atas teori kesejahteraan masyarakat yang diidentifikasi oleh penelitian sebelumnya dan menggabungkannya dengan teori lain, yaitu; otonomi daerah sebagai variabel bebas, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Variabel independen berupa otonomi daerah merupakan kemampuan inti untuk membiayai kegiatan daerah, yang tercermin dalam derajat otonomi daerah dan diukur sebagai jumlah pendapatan asli daerah plus dana bagi hasil dibagi dengan total pengeluaran dalam satu periode. Sementara itu kesejahteraan masyarakat digambarkan sebagai suatu keadaan dimana rakyat menikmati hasil pembangunan baik itu kesehatan dan pendidikan serta mempunyai pendapatan atau penghasilan untuk hidup yang layak. Indikator kesejahteraan masyarakat yang memenuhi gambaran tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis atau model penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif deskriptif dan pengaruh. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilengkapi dengan perhitungan statistik, sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai setiap variabel, supaya dapat lebih memahami variabel-variabel tersebut. Studi pengaruh bertujuan untuk mengetahui dampak dua variabel atau lebih. Melalui penelitian ini dapat dirumuskan suatu teori untuk menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan suatu fenomena (Sujarweni, 2019).

Metode pendekatan kuantitatif berpusat pada pengujian hipotesis menggunakan alat analisis statistik, mendasarkan pada pengolahan data yang terukur untuk menarik kesimpulan penelitian. Dengan mempertimbangkan tujuan dari dilakukannya riset yaitu untuk menelusuri keterkaitan antar variabel yang dipilih, dalam menganalisis dan menyimpulkan penerapan sistem otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, peneliti berpendapat jenis penelitian ini tepat dilakukan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Berfokus pada organisasi publik (pemerintahan), penelitian ini bertempat di Indonesia dengan periode waktu yang diobservasi antara tahun 2015-2021. Pemilihan masa periode pengamatan didasarkan pada fakta bahwa tidak ada penambahan DOB baik itu pemekaran maupun penggabungan wilayah selama jangka waktu tersebut, sehingga tidak akan mempengaruhi laporan pertanggungjawaban APBD yang telah disampaikan ke Kementerian Keuangan

Republik Indonesia melalui laman resmi <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subyek atau obyek yang mempunyai ciri-ciri dan kualitas spesifik yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diperoleh kesimpulannya (Sujarweni, 2019).

Populasi pada penelitian ini meliputi keseluruhan daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan jumlah sampel 508 yang terdiri dari; 415 kabupaten dan 93 kota, tidak termasuk kabupaten kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta karena merupakan daerah administratif. Pasal 3 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 menyebutkan daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah, dikecualikan untuk kota administrasi dan kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta (Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 23 Tahun 2014). Menurut Wikipedia, kabupaten dan kota administratif bukanlah daerah otonom, karena tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Begitu pula dengan penunjukkan jabatan Bupati berikut Wakil Bupati kabupaten administratif, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota administratif diangkat langsung oleh Gubernur dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

3.3.2 Sampel

Menurut (Sujarweni, 2019), bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan digunakan untuk penelitian disebut sampel. Dikarenakan besarnya populasi serta terbatasnya waktu dan tenaga, maka peneliti menarik sampel yang diambil dari populasi dengan menggunakan rumus Slovin (Sujarweni, 2019) sebagaimana berikut ini:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Dimana:

n = ukuran sampel

N = populasi

e = prosentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan

Berdasarkan rumus tersebut, maka dapat dilakukan penghitungan pengambilan jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{508}{1 + (508 \times 0,05^2)}$$

$$n = \frac{508}{1 + 1,27}$$

$$n = 224$$

Diperoleh jumlah sampel (n) yang dibutuhkan sebanyak 224 kabupaten/kota, yang diharapkan dapat mewakili keseluruhan populasi. Dikarenakan jumlah kabupaten/kota setiap provinsi berbeda, maka terlebih dahulu ditentukan proporsi jumlah kabupaten/kota yang ada di masing-masing provinsi terhadap keseluruhan populasi (N). Dan selanjutnya dikalikan dengan jumlah sampel (n), dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Sampel kabupaten/kota per provinsi} = \frac{\text{jumlah kabupaten/kota}}{508} \times 224$$

Kemudian, setelah ditetapkan jumlah sampel kabupaten/kota per provinsi dengan menggunakan rumusan diatas, langkah berikutnya adalah pengambilan sampel secara acak yang mewakili masing-masing provinsi dengan memanfaatkan metode sampling microsoft excel. Berikut ini hasil penetapan sebaran sampel penelitian yang ditunjukkan pada tabel 3.1:

Tabel 3.1 Sebaran sampel kabupaten dan kota di Indonesia

No	Provinsi	Proporsi Kab	Proporsi Kota	Jumlah	Sampel Kab	Sampel Kota	Jumlah
1	Aceh	18	5	23	8	2	10
2	Sumatera Utara	25	8	33	11	4	15
3	Sumatera Barat	12	7	19	5	3	8
4	Jambi	9	2	11	4	1	5
5	Riau	10	2	12	4	1	5
6	Kepulauan Riau	5	2	7	2	1	3
7	Bengkulu	9	1	10	4	0	4
8	Sumatera Selatan	13	4	17	6	2	8
9	Kepulauan Bangka Belitung	6	1	7	3	0	3
10	Lampung	13	2	15	6	1	7
11	Jawa Barat	18	9	27	8	4	12
12	Banten	4	4	8	2	2	4
13	Jawa Tengah	29	6	35	13	3	16
14	DI Yogyakarta	4	1	5	2	0	2
15	Jawa Timur	29	9	38	14	4	18
16	Bali	8	1	9	4	0	4
17	Nusa Tenggara Barat	8	2	10	4	1	5
18	Nusa Tenggara Timur	21	1	22	9	0	9
19	Kalimantan Barat	12	2	14	5	1	6
20	Kalimantan Tengah	13	1	14	6	0	6
21	Kalimantan Selatan	11	2	13	5	1	6
22	Kalimantan Timur	7	3	10	3	1	4
23	Kalimantan Utara	4	1	5	2	0	2
24	Sulawesi Utara	11	4	15	5	2	7
25	Gorontalo	5	1	6	2	0	2
26	Sulawesi Tengah	12	1	13	5	0	5
27	Sulawesi Selatan	21	3	24	9	1	10
28	Sulawesi Tenggara	15	2	17	7	1	8
29	Sulawesi Barat	6	0	6	3	0	3
30	Maluku	9	2	11	4	1	5
31	Maluku Utara	8	2	10	4	1	5
32	Papua	28	1	29	12	0	12
33	Papua Barat	12	1	13	5	0	5
Total		415	93	508	186	38	224

Sumber : data diolah (BPS)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian adalah data sekunder, yang merupakan data yang dikumpulkan, diperoleh dan telah diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari laporan APBD yang dipublikasikan melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta hasil survei dan perhitungan Badan Pusat Statistik terkait data indeks pembangunan manusia dan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010.

Data penelitian meliputi pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, belanja modal serta belanja daerah, yang diunduh dari website <https://djpk.kemenkeu.go.id/> dan telah di *compare* dengan LKPD *Audited* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara random untuk membuktikan kebenarannya. Sedangkan informasi mengenai indeks pembangunan manusia serta laju pertumbuhan ekonomi diunduh melalui website <https://bps.go.id/>.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Ada tiga kategori variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel eksogen, intervening, dan endogen. Definisi operasional serta ukuran variabel-variabel tersebut disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Pengukuran
Otonomi Daerah	Otonomi daerah memberi keleluasaan pada penda setempat untuk menggali potensi yang dimiliki berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Atas sumber pendapatan daerah yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, daerah berhak memperoleh bagian yang dihitung berdasarkan proporsi sebagai daerah penghasil yang ditransfer melalui APBN dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan juga berhak atas DBH antar daerah melalui APBD. Otonomi daerah diproksikan sebagai persentase kemampuan mendanai program-program pembangunan secara mandiri yang diukur dari PAD dan DBH terhadap Belanja Daerah (Siregar & Badrudin, 2017)	$\frac{(PAD + DBH)}{\text{Belanja Daerah}} \times 100$

Belanja Modal	Dengan kewenangan yang dimiliki sebagai daerah otonom, pemda dapat menentukan besaran belanja modal dari keseluruhan pengeluarannya. Besaran nominal belanja modal setiap daerah tidak sama disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, ukuran rasio belanja modal lebih memiliki makna nilai analisis untuk dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Rasio belanja modal diukur berdasarkan jumlah belanja modal terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah (Mahsun, 2018).	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100$
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi daerah adalah cerminan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah didefinisikan sebagai perubahan dari <i>Product Domestic Regional Bruto</i> (Δ PDRB), yaitu perubahan peningkatan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu daerah. PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga (BPS).	Δ PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010
Kesejahteraan Masyarakat	Tujuan utama implementasi sistem otonomi daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera di proksikan melalui IPM yang merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yang dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan (BPS).	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

3.6 Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam riset ini dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memperoleh deskripsi atau gambaran tentang ciri-ciri masing-masing variabel penelitian, sedangkan analisis verifikatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Data sekunder yang telah dihimpun, akan dilakukan beberapa tahapan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum dan kondisi sebaran data masing-masing variabel penelitian. Statistik deskriptif menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel berupa

nilai terkecil, nilai terbesar, nilai rata-rata dan standar deviasi. Tujuan analisis dekriptif agar dapat membantu dalam tahap pembahasan hasil pengujian hipotesis.

3.6.2 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan mengkonfirmasi hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan menggunakan alat analisis model persamaan struktural atau *Structural Equation Modeling – Partial Least Square* (SEM-PLS). Alat analisis ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara bersamaan memodelkan dan memperkirakan hubungan kompleks (memprediksi hubungan sebab akibat) antara variabel otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui variabel intervening belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dibentuk pada kerangka penelitian. Penggunaan model persamaan struktural SEM-PLS juga memberikan kemampuan untuk menganalisis jalur (*path*) dengan variabel laten dan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi bagi peneliti untuk menghubungkan antara teori dan data (Ghozali, 2014).

3.7 Tehnik Analisis Data

PLS memperkenalkan dua model formal persamaan struktural yaitu *outer model* dan *inner model*. *Outer model* adalah model pengukuran yang menjelaskan hubungan antara indikator dengan konstruksinya (variabel laten), sedangkan *inner model* adalah model struktural yang menghubungkan antar variabel laten (Ghozali, 2014). Model struktural yang dibangun pada penelitian ini berfokus pada mengaitkan hubungan antara variabel eksogen otonomi daerah dan variabel endogen kesejahteraan masyarakat dengan dua variabel antara (belanja modal dan pertumbuhan ekonomi), sehingga model struktural *inner model* lebih tepat untuk digunakan. *Inner model* merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Adapun tahapan analisa *inner model* untuk kepentingan menganalisis otonomi daerah melalui beberapa uji statistik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.7.1 Analisis Jalur (*path analysis*)

Analisis jalur adalah pengembangan langsung dari bentuk regresi berganda yang dirancang untuk memberikan perkiraan besarnya dan pentingnya hubungan

kausal antar variabel (W. S. Handayani et al., 2021). Teknik analisis jalur (*path analysis*) merupakan suatu cara untuk menganalisis pola hubungan sebab akibat yang terjadi antar variabel, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian manfaat dari analisis jalur adalah untuk memberi penjelasan terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti.

Pengujian statistik analisis jalur memperoleh suatu nilai yang berguna dalam menunjukkan arah hubungan antar variabel, apakah memiliki arah yang positif atau negatif. Analisis jalur memiliki nilai yang berada di rentang -1 sampai dengan 1. Jika nilai berada pada rentang 0 sampai dengan 1 maka dapat dinyatakan positif, sedangkan jika nilai berada pada rentang -1 sampai dengan 0 maka dapat dinyatakan negatif. Ada beberapa hubungan penting yang dapat dijelaskan dari analisis ini, yaitu:

1. *Direct Effects*

Direct effects menjelaskan pengaruh langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen dan variabel intervening.

2. *Indirect Effects*

Indirect effects menjelaskan pengaruh tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel mediasi atau variabel intervening.

3.7.2 Pengujian kelayakan model (*goodness fit of model*)

Pada penelitian ini, uji kelayakan model dinyatakan dengan nilai koefisien determinasi atau *R-Square* (R^2) yang menunjukkan besarnya persentase variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan variabel intervening. *R-Square* (R^2) adalah angka antara 0 dan 1 yang mengisyaratkan seberapa baik variabel independen dikombinasikan dengan variabel lain yang dipengaruhinya. Semakin besar R^2 maka persentase perubahan variabel dependen akibat perubahan variabel independent akan semakin besar. Sebaliknya jika R^2 semakin kecil, maka persentase perubahan variabel dependen akibat perubahan variabel independen semakin kecil.

3.7.3 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang sifatnya sementara atas suatu persoalan, berupa dugaan yang didasari teori dan penelitian terdahulu yang masih harus dipastikan kebenarannya melalui proses riset atau penelitian. Pengujian hipotesis merupakan bagian dari statistik inferensial yang ditujukan untuk memperoleh kesimpulan mengenai populasi yang dipelajari, atas dasar data sampel dari populasi. Pengujian hipotesis bertujuan untuk menjustifikasi apakah hipotesis yang telah diajukan diterima atau ditolak.

Dasar yang digunakan untuk menjustifikasi hipotesis adalah nilai koefisien jalur, nilai t-statistik dan p-value yang terdapat pada output *final results*. Dan untuk menilai signifikansi model prediksi dalam pengujian model struktural dengan cara membandingkan t-hitung atau *t-statistic* dengan t-tabel pada kriteria;

- 1) jika t-statistik lebih besar dari t-tabel sebesar 1,64 ($t\text{-statistic} > 1,64$) dengan α 5 %, maka pengaruh variabel dinyatakan signifikan serta hipotesis diterima;
- 2) jika t-statistik lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,64 ($t\text{-statistic} < 1,64$) dengan α 5 %, maka pengaruh variabel dinyatakan tidak signifikan dan hipotesis ditolak.

Nilai t-tabel sebesar 1,64 adalah nilai absolut atau nilai mutlak yang diperoleh dari tabel distribusi (tabel t) untuk pengujian hipotesis satu arah (*one tile*) dengan jumlah sampel (N) yang besar (lebih dari 1000) atau tidak terhingga.

Pengujian hipotesis dengan SEM-PLS berlaku metode *bootstrap* yang merupakan metode statistika non parametrik untuk mengestimasi parameter suatu distribusi, varians sampel, dan menaksir tingkat kesalahan. Pada prosedur *bootstrap*, sampel diperoleh dengan cara *resampling* dan *replacement* untuk mendapatkan standar error yang dikembangkan oleh Efron (1979), sebagai alat untuk membantu mengurangi kesalahan terkait keandalan dalam penggunaan distribusi normal dan penggunaannya. *Bootstrap* membuat data bayangan dengan menggunakan informasi dari data asli dengan memperhatikan sifat-sifat data asli, sehingga mempunyai karakteristik yang sangat mirip dengan data asli. Tujuan *bootstrapping* adalah untuk menguji tingkat akurasi pada sampel dan juga untuk meminimalkan ketidaknormalan data penelitian. Hasil pengujian dengan

bootstrapping sebagai dasar untuk pembahasan masing-masing pengujian hipotesis dengan menganalisis;

1. Koefisien Jalur Pengaruh Langsung (*Direct Effects*)

Signifikansi parameter yang diestimasi pada tahap pengolahan data, memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi pengaruh hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel mediasi. Dikarenakan hipotesis penelitian mengarah pada penelitian satu sisi (*one tile*), maka nilai koefisien jalur (*path coefficient*) positif atau negatif menentukan arah hubungan antar variabel dengan tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

Pengujian hipotesis kesatu sampai dengan kelima adalah untuk mengkonfirmasi prediksi sementara, atas pengaruh langsung variabel independen terhadap dependen, variabel independen terhadap variabel mediasi dan variabel mediasi terhadap variabel dependen. Hasil estimasi parameter melalui uji statistik akan membantu peneliti untuk memverifikasi apakah prediksi-prediksi tersebut diterima atau ditolak. Selain dari pada itu, hasil pengujian akan membuktikan keterkaitan antar variabel, yang selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu untuk kemudian ditarik kesimpulan atas pengujian ini.

2. Koefisien Jalur Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effects*)

Pengujian hipotesis keenam dan ketujuh adalah untuk menguji peran variabel mediasi, yang mengintervensi efek langsung variabel independen dan variabel dependen. Pengaruh tidak langsung dapat dievaluasi melalui nilai total efek yang diperoleh dari penjumlahan nilai koefisien *direct effects* dan *indirect effects*. Koefisien *indirect effects* merupakan hasil perkalian nilai estimasi regresi (koefisien jalur) variabel independen terhadap variabel mediasi dan nilai estimasi regresi (koefisien jalur) variabel mediasi terhadap variabel dependen. Nilai total efek digunakan sebagai dasar pembahasan pengujian hipotesis pengaruh hubungan otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal dan pertumbuhan ekonomi sebagai pemediasi. Kemudian sebagai

kesimpulan akhir riset ini dilakukan perbandingan antara efek langsung dan tidak langsung variabel otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Otonomi daerah adalah sistem ketatanegaraan yang memberi dampak pada pola pembagian kewenangan urusan pemerintahan, serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pada dasarnya, sistem otonomi daerah hanyalah sebuah sarana yang dimaksudkan agar lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat peningkatan kesejahteraan. Implementasi otonomi daerah di Indonesia yang telah berlangsung selama lebih dari dua puluh tahun terus mengalami perkembangan. Pemerintah daerah seyogyanya telah berupaya menunjukkan keseriusannya dalam menggali sumber daya yang dimiliki secara optimal, untuk memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan penduduk diwilayahnya. Studi ini bertujuan untuk menguji secara empiris dampak implementasi otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, yang menjadi sasaran utama dari penerapan sistem otonomi daerah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan sistem otonomi daerah sebagai strategi pembangunan di Indonesia adalah keputusan yang tepat. Bukti empiris menemukan bahwa sejak diterapkan sistem otonomi daerah kesejahteraan masyarakat terus mengalami peningkatan. Namun demikian, hasil penelitian ini hanya bersifat generalisasi. Perihal masih adanya fenomena kemiskinan ekstrem di beberapa wilayah menunjukkan jika kesejahteraan masyarakat masih belum merata. Ketimpangan kesejahteraan memicu masalah internal mengenai ketidakpuasan terhadap sistem dan penyelenggaraan pemerintahan oleh beberapa kelompok separatisme, yang membutuhkan perhatian

khusus dan penanganan segera. Namun secara umum sistem otonomi mampu meredam keinginan daerah-daerah yang sebelumnya ingin membentuk negara sendiri (seperti; Yogyakarta, Maluku, Aceh, Papua, dll), dan menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Situasi ini diharapkan mampu menarik minat investor untuk berinvestasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Word Bank*, Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia yang semula anjlok di tahun 1998 hingga minus 0,3 mampu berangsur membaik di tahun-tahun berikutnya pasca diberlakukannya sistem otonomi daerah. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bagaimana dampak otonomi daerah terhadap penanaman modal asing tersebut.

Pelimpahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya, telah menarik partisipasi masyarakat setempat untuk menentukan nasib daerahnya sendiri serta penyelenggaraan pemerintahan pun menjadi lebih efektif dan efisien. Sayangnya, kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan dan merealisasikan belanja modal masih sangat rendah, sehingga walaupun terbukti secara empiris belanja modal dapat memediasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi efeknya sangat lemah. Secara spesifik, temuan ini menegaskan apabila realisasi nyata belanja langsung yang dialokasikan ke dalam belanja modal benar-benar bisa membuat rakyat lebih sejahtera.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan sebagai dampak dari otonomi daerah yang dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Penjelasan yang mungkin terkait temuan ini adalah meskipun pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dari potensi yang dimiliki, tetapi ditinjau dari kemampuan daerah untuk membiayai pengeluarannya masih relatif rendah. Ini berarti kontribusi PAD dan DBH terhadap perekonomian daerah sangat kecil. Disamping itu, belanja daerah yang tidak tepat sasaran dan tidak produktif, seperti; mangkraknya sejumlah bangunan dan fasilitas umum yang tidak digunakan atau pembangunan yang tidak dilanjutkan karena pergantian pemimpin daerah, kualitas pembangunan jalan yang buruk sehingga menghambat kegiatan ekonomi transportasi darat, dan maraknya kasus korupsi di daerah, diprediksi oleh peneliti menyebabkan aktivitas perekonomian melambat dan pertumbuhan ekonomi menurun. Hal-hal tersebut diatas mengakibatkan efek dari

otonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat tidak seperti yang diharapkan.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini menguji kemampuan teori agensi dan teori stewardship, yang mana pemerintah daerah adalah agen yang diberi kepercayaan oleh rakyat selaku principal, untuk bertindak sebagai steward dengan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam mengelola sumber daya dan mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai pemilik sumber daya tersebut. Sistem otonomi daerah diharapkan mampu meminimalisir adanya asimetri informasi antara pemerintah dan rakyat (agen vs principal), yang dapat menyerap aspirasi dan partisipasi penduduk setempat sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah dalam merencanakan dan menganggarkan alokasi belanja serta menstimulasi aktivitas perekonomian masih sangat lemah. Implikasi dari kedua teori ini adalah semestinya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seharusnya lebih mengutamakan keberpihakan kepada rakyat. Ini berarti prinsipal yang diwakili oleh dewan legislatif atau parlemen harus lebih aktif lagi dalam menentukan arah kebijakan penyusunan anggaran dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaannya untuk melindungi kepentingan rakyat.

5.2.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini memiliki sejumlah implikasi praktis bagi pemerintah, dewan legislatif, akademisi dan pengamat ekonomi. Pertama, merekomendasikan keberlanjutan implementasi sistem otonomi daerah dan membuka keran pemekaran DOB sesuai syarat-syarat yang diberlakukan. Kedua, hasil dari penelitian ini menunjukkan belanja modal mampu menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat meskipun lemah karena porsi belanjanya terlalu sedikit. Oleh karena itu, sebaiknya anggaran belanja langsung berupa belanja modal sebaiknya ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan tajam. Pemerintah harus menyadari peran sebagai agen adalah melayani prinsipal (rakyat). Semestinya semua aturan maupun kebijakan yang dibuat harus pro

rakyat. Demikian pula dewan legislatif yang merupakan wakil dari rakyat, hendaknya benar-benar mengawasi dan mengontrol proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan APBD dan segala tindakan eksekutif lainnya, demi kepentingan seluruh rakyat bukan pribadi atau golongan.

Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Yang dapat terus dikembangkan untuk kesempurnaan dan diuji kebenarannya. Keadaan sebenarnya tentang kesejahteraan rakyat menjadi PR bersama. Karena pemerintah juga tidak dapat bekerja sendiri tanpa didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kritik dan masukan dari para pejuang pengetahuan (akademisi) dan pengamat ekonomi diharapkan akan mampu melahirkan para pejabat publik yang berkompeten dan bertanggungjawab.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Terdapat beberapa keterbatasan untuk penelitian ini. Pertama, penelitian ini hanya menguji variabel belanja modal dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Disarankan bagi peneliti selanjutnya dalam kajian yang serupa untuk menggunakan variabel mediasi lainnya, contohnya variabel belanja pegawai. Karena kebijakan untuk penerimaan pegawai diserahkan kepada masing-masing daerah sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan sering terjadinya kelebihan jumlah pegawai (overload), yang berakibat pada membengkaknya anggaran dan realisasi belanja pegawai. Namun apakah realisasi belanja pegawai mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dapat diteliti dan dianalisis lebih lanjut.

Kedua, variabel independen lain yang disarankan untuk menguji dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan transfer berupa dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa. Salah satu tujuan alokasi dana desa adalah mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Oleh sebab itu, diperlukan studi empiris untuk menguji apakah program tersebut efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari level terendah struktur pemerintahan (desa).

DAFTAR PUSTAKA

- Ambya, A. (2019). Perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Lampung (Model Tipologi Klassen). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(3), 199–210.
- Arka, S., & Yasa, I. K. O. A. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antardaerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 44328.
- Aryawati, N. P. A., & Sudana, I. P. (2018). Kinerja keuangan memediasi dana perimbangan, alokasi belanja daerah pada indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ilmiah Akutansi Dan Bisnis*, 13(1).
- Ayu, P. P., & Septiani, T. (2019). Determinan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari pendapatan daerah dan tingkat kemandirian daerah. *Jurnal Kajian Akutansi*, 3(2), 184–195.
- Badrudin, R. (2011). Effect of fiscal decentralization on capital expenditure, growth and welfare. *Economic Journal of Emerging Markets*, 3(3), 211-223.
- Badrudin, R., & Kuncorojati, I. (2017). The effect of district own-source revenue and balance funds on public welfare by capital expenditure and economic growth as an intervening variable in Special District of Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 19(1), 54–59.
- Badrudin, R., & Siregar, B. (2015). The evaluation of the implementation of regional autonomy in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 1–11.
- Canare, T. (2021). Decentralization and development outcomes: What does the empirical literature really say? *Hacienda Publica Espanola*, 237, 111–151.
- Canare, T. (2022). Decentralization and welfare: Evidence from a panel of countries. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 93(3), 767–796.
- Cassette, A., & Paty, S. (2010). Fiscal decentralization and the size of government: a European country empirical analysis. *Public Choice*, 143, 173–189.

- Chygryn, O., Petrushenko, Y., Vysochyna, A., & Vorontsova, A. (2018). Assessment of fiscal decentralization influence on social and economic development. *Montenegrin Journal of Economics*, 14(4), 69–84.
- Daud, N., & Soleman, R. (2020). Effects of fiscal decentralization on economic growth and human development index in the Indonesian local governments. *Management Science Letters*, 10(16), 3975–3980.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Fajri, M., Delis, A., & Amzar, Y. V. (2016). Dampak otonomi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan keterbukaan daerah terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.
- Ghozali, I. (2014). Structural Equation Modelling Alternatif Method with Partial Least Squares (PLS) Edisi 4. In *Universitas Diponegoro Semarang*.
- Goel, R. K., Mazhar, U., Nelson, M. A., & Ram, R. (2017). Different forms of decentralization and their impact on government performance: Micro-level evidence from 113 countries. *Economic Modelling*, 62, 171–183.
- Handayani, A. P., & Badrudin, R. (2019). Evaluation of village fund allocation on Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3), 283-295.
- Handayani, W. S., Lindrianasari, L., Yuliansyah, Y., & Gamayuni, R. R. (2021). The Effect Of Strategic Performance Measurement System And Service Strategy On A Firm's Performance. *Psychology And Education*, 58(2), 4288–4302.
- Kim, S. (2018). Evaluating short- and long-term effectiveness of capital expenditure in the subnational governments: evidence from US states. *International Journal of Economics and Business Research*, 16(2), 182–195. <https://doi.org/10.1504/IJEER.2018.094011>
- Kim, S., & Park, S. (2020). The effectiveness of capital expenditure in an endogenous growth model: evidence from US states. *International Journal of Economics and Business Research*, 19(4), 378–390. <https://doi.org/10.1504/IJEER.2020.107493>
- Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 344–365.
- Kiswanto, K., & Fatmawati, D. (2019). Determinan kinerja pemerintah daerah: ukuran pemda, leverage, temuan audit dan tindak lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 44–54.

- Kurniawati, L. (2022). The effect of fiscal decentralization on economic growth: A study of the province level in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 15.
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–11.
- Liu, Y., Martinez-Vazquez, J., & Wu, A. M. (2017). Fiscal decentralization, equalization, and intra-provincial inequality in China. *International Tax and Public Finance*, 24(2), 248–281. <https://doi.org/10.1007/s10797-016-9416-1>
- Mahi, B. R. (2016). Indonesian decentralization: Evaluation, recent movement and future perspectives. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 31(1), 119–133.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru* (P. Andi. (ed.)).
- Martínez-Vázquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095–1129.
- Matsui, K. (2005). Post-decentralization regional economies and actors: Putting the capacity of local governments to the test. *The Developing Economies*, 43(1), 171–189.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2).
- Nashshar, M. I., & Mulyana, B. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(3), 255–270.
- Nurhidayati, L. L., & Yaya, R. (2013). Alokasi belanja modal untuk pelayanan publik: praktik di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 17(2), 102–114.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/78212ed1-0307-41c2-a472-9930e76a3a79>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/d2ddad5b-9de1-47a8-45f4-08d9db162ba7>
- Purnamawati, I. G. A., & Yuniarta, G. A. (2021). *Ekonomi Makro : Teori dan Kebijakan*.

- Rizky, H. P., & Setiawan, D. (2019). Perkembangan penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(2), 94–116.
- Rustan, A. (2013). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, serta kaitannya dengan otonomi daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 9(3).
- Sasana, H. (2009). Analisis dampak pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota provinsi jawa tengah dalam era desentralisasi fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 16(01).
- Shelton, C. A. (2007). The size and composition of government expenditure. *Journal of Public Economics*, 91(11–12), 2230–2260.
- Siregar, B., & Badrudin, R. (2017). Degree of fiscal decentralization and flypaper effect: evidence from Indonesia. *Advanced Science Letters*, 23(9), 9013–9019.
- Subroto, W. T., & Baidlowi, I. B. (2022). Does funding decentralization can influence the local economic growth? *Iranian Economic Review*, 26(2), 311–323.
- Sujarweni, W. (2019). Metodologi Penelitian - Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif. In *Metodologi Penelitian*.
- Supriyatno, B. (2021). The effect of decentralization policy in improving community welfare regional government of special Yogyakarta-Indonesia. *Modern Applied Science*, 15(1), 1–95.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55.
- Yandri, P. (2012). Autonomy policy and social welfare in Tangerang City. *Economic Journal of Emerging Markets*, 52–62.
- Kemendagri, RI. (2019). Pembentukan daerah-daerah otonom di Indonesia sampai dengan tahun 2014. Diakses pada 4 Maret 2023, dari <http://digi.web.id/kemendagri/wp-content/uploads/2019/03/Pembentukan-Daerah-Daerah-Otonom-di-Indonesia-s.d-Tahun-2014-2.pdf>
- Kementerian Setneg, RI (2023). Sambutan Presiden Joko Widodo pada Pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023. Diakses pada 4 Maret 2023, dari https://www.setneg.go.id/baca/index/sambutan_presiden_joko_widodo_pada_pembukaan_rakornas_kepala_daerah_da_forkopimda_se_indonesia_tahun_2023

- Nikolaus Harbowo, Kurnia Yunita Rahayu. 14 September 2022. DPR Kaji Pemekaran Daerah Dibuka Lagi. Diakses pada 4 Maret 2023, dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/09/14/dpr-kaji-pemekaran-daerah-dibuka-lagi>
- Kemenkeu, RI (2023). Data dan Informasi APBD_Data Keuangan Daerah mulai 2006. Diakses pada 4 Maret 2023, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/#>
- Badan Pusat Statistik, RI (2023). (Metode Baru) Indeks Pembangunan Manusia. Diakses pada 4 Maret 2023, dari <https://bps.go.id/indicator/26/413/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>
- Ensiklopedia Bebas Multibahasa. 21 April 2023. Diakses pada 1 Juli 2023, dari <https://id.wiktionary.org/wiki/Istimewa:Pencarian?fulltext=Search&search=raison%20d%27%C3%AAtre&ns0=1>
- Dewi Nurita. 8 Mei 2020. Jokowi tetapkan 62 daerah tertinggal, terbanyak di Papua. Diakses pada tanggal 01 Juli 2023, dari <https://nasional.tempo.co/read/1340080/jokowi-tetapkan-62-daerah-tertinggal-terbanyak-di-papua>
- Menpan, RI. 27 Desember 2021. Pemerintah terbitkan Perpres 105/2021 tentang Stranas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Diakses pada 1 Juli 2023, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/pemerintah-terbitkan-perpres-105-2021-tentang-stranas-percepatan-pembangunan-daerah-tertinggal>
- Abdul Azis Said. 15 Desember 2021. Anggaran infrastruktur daerah minim, Cuma sepertiga belanja pegawai. Diakses pada tanggal 01 Juli 2023, dari <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/61b97425dc8ba/anggaran-infrastruktur-daerah-minim-cuma-sepertiga-belanja-pegawai>
- Arief Rahman Hakim. 7 Desember 2021. Belanja PNS maksimal 30%, Pemda bisa hemat 4,7 triliun. Diakses pada tanggal 01 Juli 2023, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4731031/belanja-pns-maksimal-30-persen-pemda-bisa-hemat-rp-47-triliun>
- Pusat Kebijakan APBN, Kemenkeu (2017). Kajian SiLPA. Diakses pada 01 Juli 2023, di <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2017/06/16/145023475559543-kajian-silpa>
- Kemenkeu, RI. 7 Desember 2021. Konferensi Pers UU HKPD. Diakses pada tanggal 01 Juli 2023, dari <https://www.youtube.com/watch?v=NmPIHctMSP8>